



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

KEBIJAKAN YANG BERDIMENSI KOMPETITIF DALAM PERCATUREN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

**Muhammad Guntur
Aslinda**

ABSTRAK

Asean Economic Community 2015 merupakan organisasi Negara-negara ASEAN yang memiliki tujuan untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, guna meningkatkan stabilitas perekonomian serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang bersifat internal, eksternal maupun persaingan dengan sesama Negara ASEAN. Kebijakan yang paling mendasar dan kompetitif untuk segera dijabarkan dan diimplementasikan berkaitan dengan Asean Economic Community yaitu aspek; 1) Kebijakan publik, 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 3) Perbaikan Infrastruktur, 4) Daya Saing Indonesia, dan 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mewujudkan kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian internasional.

Kata Kunci: Kebijakan Berdimensi Kompetitif dan MEA

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi Asean sudah didepan mata, sisa menghitung hari apakah Indonesia dalam menghadapi momentum yang sangat kompetitif ini sudah memiliki kesiapan atau belum, utamanya dalam bidang ekonomi dan industri, dimana pada awal tahun 2016 bangsa ini mau tidak atau suka tidak suka pasti berada dalam seputar MEA sebagai konsekuensi dari berlakunya kesepakatan regional.

Kehadiran negara-negara ASEAN yang membawa konsekuensi berbagai dimensi, sehingga pemerintah dan pelaku bisnis harus mampu mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan dalam bidang pengembangan tenaga kerja yang unggul dan produktif, serta mengembangkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang disepakati Pasar Tunggal ASEAN. Kalau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi kenyataan, tidak menutup kemungkinan batas-batas negara antara sesama anggota ASEAN akan hilang



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

dengan sendirinya. Tidak hanya bisnis barang yang akan melewati batas-batas negara kawasan MEA, tetapi juga bisnis jasa (*services*). Kegiatan jasa ini tidak bisa dilepaskan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam kegiatan bisnis, lebih-lebih dalam bisnis yang sifatnya jasa (*services*). Termasuk dalam jasa keuangan (*financial services*), seperti asuransi.

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN *Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), ASEAN *Industrial Complementation scheme* (1981), ASEAN *Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Era globalisasi seperti dengan dimulainya masyarakat ekonomi asean ini ditandai dengan makin kompetitifnya lingkungan bisnis, oleh karena itu diperlukan strategi bisnis yang tepat yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dalam persaingan. strategi bisnis yang harus di susun dipikirkan secara matang seperti persaingan antar perusahaan yang ada, hambatan bagi pendatang baru (*new entries*), kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) para pembeli, kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) para pemasok, dan ancaman dan barang dan jasa pengganti/substitusi (Faulkner and Browman, 1997).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dimuat dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN dalam usaha memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang beraggotakan 10 negara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) memiliki pandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, serta terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis. Untuk itu, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membangun suatu “masyarakat ASEAN” pada tahun 2020. Dalam perkembangannya para pemimpin



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Negara anggota mempertegas komitmennya dan memutuskan untuk mempercepat pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 2015, akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM.

Teori Integrasi Ekonomi dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dalam teori integrasi ekonomi para kaum liberal meyakini bahwa perdagangan bebas akan membawa perdamaian dalam hubungan internasional. Karena perdagangan bebas akan menciptakan interdependensi dan kerjasama saling menguntungkan antar negara-negara pelaku pasar. Kaum liberal memiliki prinsip bahwa kebebasan dalam lalulintas ekonomi akan mengarah kepada kebebasan pasar dan peran negara tidak terlalu diperhitungkan. Menurut Balassa (1962) integrasi dibedakan sebagai konsep dinamis yaitu melalui penghapusan diskriminasi di antara negara yang berbeda, maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Sedangkan pandangan yang dikemukakan oleh Ernst B. Haas (1971) dalam Sitepu (2003) bahwa konsep integrasi adalah sebagai *"a process for the creation of political communities defined institutional or attitudinal terms"*.

Dalam Teori Model Gravitasi adalah teori yang menggambarkan tingkat interaksi spasial antar dua entitas atau lebih yang mempunyai gejala fisik (Nijkamp and Reggiani 1992; Harvey, 1969). Berdasarkan teori tersebut dibuatlah suatu persamaan yang disebut dengan Persamaan Gravitasi atau Model Gravitasi (Gravity Model). Model Gravitasi adalah persamaan/model yang digunakan untuk menganalisa arus antar dua entitas yang terpisah secara geografis (dalam Sebayang, 2011). Teori Model Gravitasi menggunakan pendekatan persamaan dalam artian bahwa negara-negara yang tergabung dalam kelompok MEA harus membuat suatu kebijakan dalam mengembangkan produk baik dilihat dari jenis dan volume produk maupun dilihat dari segi kebijakan integrasi antar negara sesama anggota MEA.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN membentuk kesepakatan dalam bentuk integrasi ekonomi yang lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan bentuk kerjasama ekonomi. Berdasarkan kajian teori perdagangan internasional dikenal beberapa tahapan integrasi ekonomi regional, antara lain: (1) preferential trade agreement (PTA); (2) free trade area (FTA); (3) custom union (CU); (4) single market; (5) monetary union; (6) political union (Balassa, 1962). Dalam pertemuan negara-negara ASEAN sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi terdapat empat prioritas dalam kerangka AEC yakni, (1) adanya arus barang dan jasa yang bebas (free flow good services), (2) Ekonomi regional yang kompetitif (competitive economic region), (3) Perkembangan ekuitas ekonomi (equitable economic development), Integrasi memasuki ekonomi global



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

(full integration into global economy) infrastruktur dan energi, pemberian insentif, memperkuat FTZ (Free Trade Zone) dan (4) Membangun kawasan Ekonomi Khusus, perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan peraturan, serta pengembangan industri prioritas dan kompetensi inti daerah (Henry, 2007).

Dalam menghadapi pencatutan Asean Economic Community 2015, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia sangat perlu membuat kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah pusat dengan daerah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam mempersiapkan berbagai program yang berkaitan dengan pelaksanaan AEC. Adapun aspek-aspek yang bersentuhan langsung dengan aktivitas-aktivitas dalam AEC, antara lain: 1) Kebijakan publik, 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 3) Perbaikan Infrastruktur, 4) Daya Saing Indonesia, dan 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik sebagai proses manajemen didasarkan pada adanya serangkaian fase kerja dari pejabat-pejabat publik. Dimana adanya proses dalam pembentukan kebijakan atau serangkaian aturan dan tindakan dalam membuat suatu kebijakan baik itu dimulai dari agenda setting sampai pada proses reformulasi kebijakan atau implementasi, pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Oleh Anderson (1975) dalam Tangkilisan (2003) Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan, 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dalam menghadapi realisasi Asean Economic Community 2015, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan pemerintah suatu negara melalui peraturan atau kebijakan (*policy*). Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan (*policy*) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Asean Economic Community pada tahun 2015 kelak. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan bagaimana kesiapan Indonesia dalam hal pengaturan kebijakan (*policy*) sebagai upaya persiapan menyongsong Asean Economic Community 2015.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

AEC ibarat dua mata pisau bagi Indonesia, bisa menjadi peluang yang membawa manfaat dan berkah (*land of opportunities*) juga bisa menjadi musibah (*loss of opportunities*). Kita akan menjadi produsen yang banyak mengeksport atau justru menjadi sasaran empuk importir. Jawabannya adalah pada kesiapan Indonesia menghadapi AEC. Seberapa siapkah Indonesia menghadapi AEC?. Banyak pihak yang mendesak agar pemerintah segera melakukan persiapan menyambut AEC 2015 yang sekiranya belum terdengar gaungnya. Langkah-langkah strategis pun sebaiknya diterapkan dengan segera. Satu tahun kedepan bukanlah waktu yang sangat singkat untuk persiapan persaingan ketat ini. Setidaknya perlu segera dirumuskan suatu kebijakan untuk melaksanakan tujuh langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga diperlukan tenaga kerja yang berkualitas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Para tenaga kerja dari negara-negara MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan lebih dalam memainkan perannya dalam perekonomian antar negara. Dengan SDM yang berkualitas, tentunya mampu bersaing dalam menciptakan peluang-peluang bisnis yang berdaya saing disertai dengan inovasi dan kreativitas setiap pengambilan keputusan. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung aspek modal dan material disertai dengan pembentukan metode.

Diantara negara-negara di Asia Tenggara, hanya negara Singapura, Thailand dan Malaysia yang cenderung lebih siap dalam hal sumber daya manusia karena dipersiapkan lebih awal. Sedangkan harga dan daya tawar SDM Indonesia masih rendah bila dibanding dengan negara-negara lain dalam profesi yang sama. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengakui, kompetensi tenaga kerja industri di Indonesia masih rendah karena latar belakang pendidikan yang masih setaraf SMP ke bawah, dengan persentase mencapai 60,77 persen. Bahkan, tenaga kerja industri yang berpendidikan SMA ke bawah mencapai 94,41 persen. Selain itu tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang dihitung berdasarkan produk domestik bruto (PDB) per pekerja masih sangat rendah Sholiya H (2015).

Aspek penting yang perlu disiapkan oleh pemerintah adalah SDM yang berkualitas sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja dari negara MEA yang memiliki kualitas dan kemampuan kerja yang tinggi, peluangnya lebih besar memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Peningkatan kualitas SDM harus dibarengi dengan penguasaan iptek dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian kearah yang lebih kompetitif. Dengan SDM yang berkualitas dan unggul disertai dengan penguasaan iptek, akan berpengaruh terhadap pengembangan industri di masa akan datang, yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya transformasi ekonomi secara lebih cepat.

Kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam membangun suatu bangsa. Tenaga kerja dari berbagai negara



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

MEA yang memiliki kemampuan dan kompetensi kerja yang tinggi, akan memiliki kesempatan lebih luas mendapatkan kesempatan dalam melakoni ekonomi di dalam MEA. Dengan demikian, kita harus bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa sejajar dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Salah satu upaya yang harus ditingkatkan berkaitan dengan kualitas SDM adalah penguasaan iptek dalam rangka menopang kegiatan ekonomi yang lebih kompetitif. Dengan SDM yang berkualitas dan unggul dengan menguasai iptek, tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan industri dalam negeri. Apabila sebuah negara memiliki SDM yang handal dengan berorientasi iptek, akan tercipta transformasi struktur ekonomi yang memberi dampak pada masyarakat bangsa itu sendiri.

Untuk mempersiapkan Sumberdaya manusia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat penting agar mampu bersaing dengan Negara Negara ekonomi berkembang seperti india dan china. Seorang yang memiliki keahlian dan keterampilan (skilled labor) yang nantinya mampu bertahan di pasar ASEAN sedangkan yang tidak memiliki skill, ia akan tersingkirkan dengan sendirinya dari kompetisi. Kriteria skilled labor ini memang tidak terlalu dijelaskan dalam Blueprint AEC. Namun secara umum, skilled labor ini adalah pekerja yang mempunyai keterampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, dan kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi, sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja (Ditjenkpi Kemendag, 2014).

Menghadapi era MEA yang penuh dengan persaingan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi persoalan penting, karena masih banyak industri yang kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap produktivitas, utamanya industri yang menggunakan teknologi tinggi. Berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam rangka kehadiran MEA 2015 antara lain: 1) Masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*). Hal ini ditandai oleh banyaknya pencari kerja utamanya lulusan perguruan tinggi yang hanya mengandalkan selembat ijazah untuk melamar suatu pekerjaan di kantor, 2) Rendahnya minat untuk berwirausaha, sehingga jumlah wirausahawan baru yang tercipta masih sangat kurang. Sesungguhnya negara akan maju dalam bidang ekonominya bila masyarakatnya lebih memilih berwirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja. Pekerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja tidak terdidik yang berimbas pada peningkatan, 3) Sektor informal masih mendominasi lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja yang belum terdidik, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah, 4) Pengangguran di Indonesia masih tertinggi diantra negara anggota ASEAN, termasuk ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA 2015, 5) Persoalan upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah belum mampu memberi solusi yang berpihak pada tenaga kerja Indonesia.

Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu persyaratan yang mendasar guna mendukung kehadiran negara-negara Asiaan seperti sarana logistik yang dapat



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

meningkatkan daya saing untuk mempercepat keluar masuknya barang. Ketersediaan sara komunikasi yang mendukung kelancaran komunikasi, listrik yang mendukung kegiatan produksi, sarana transportasi yang memperlancar kegiatan bisnis, sarana jalan yang dapat mengintegrasikan satu daerah ke daerah lain, pelabuhan dan bandara sebagai sarana lintas pulau dan negara yang mendukung percepatan arus barang, dan lain-lain. Kesemua faktor tersebut sangat mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Oleh karenanya, perbaikan infrastruktur ini harus disegerakan. Tersendatnya logistik dapat meningkatkan inflasi. Karena daya saing juga sangat ditentukan cepat lambatnya keluar masuk barang.

Infrastruktur yang kini dimiliki oleh Indonesia masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan MEA, untuk itu diperlukan adanya perbaikan atau bahkan penambahan infrastruktur untuk menunjang keberhasilan MEA. Infrastruktur seperti sarana transportasi, sarana umum, serta berbagai jenis infrastruktur lainnya perlu diperbaiki. Misalnya untuk menunjang kemudahan dalam transportasi, diperlukan adanya perbaikan atau pembangunan jalan, jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk perdagangan luar negeri juga diperlukan pelabuhan yang memenuhi syarat sebagai sarana perdagangan antar negara. Dengan adanya infrastruktur yang baik maka besar kemungkinan investor akan berdatangan untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan demikian Indonesia tidak kekurangan modal untuk pengembangan usaha.

Daya Saing Indonesia

Global Economics Forum (Schwab, 2013) menyatakan bahwa daya saing dipengaruhi oleh 12 pilar yang meliputi *factor--driven economies (Institutions, Infrastructure, Macroeconomic environment, Health and primary)*, *factor--efficiency economies (Higher education and Training, Goods market efficiency, Labor market efficiency, Financial market development, Technological readiness, Market size, dan innovation-driven economies (Business sophistication, Innovation)*. Konsep daya saing, yang dikembangkan oleh *Global Economics Forum*, melibatkan komponen statis dan dinamis. Daya saing sangat dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi tertentu yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga perekonomian negara tersebut mampu berdaya saing tinggi atas hasil Produksi dengan sumber daya ekonomi yang tersedia.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi yang kompetitif, Pemerintah Indonesia terus melakukan terobosan dalam mendukung optimalisasi daya saing dengan diterbitkannya Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014. Melalui Inpres tersebut, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi. Melalui Inpres tersebut, peningkatan daya saing dapat ditingkatkan dengan mengedepankan beberapa strategi dasar diantaranya; 1) Pengembangan industri nasional dalam rangka memenuhi pasar ASEAN; pengembangan industri dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri. Selanjutnya, pengembangan industri kecil menengah; pengembangan SDM dan



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

penelitian; dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), 2) Pengembangan pertanian, dengan fokus pada peningkatan investasi langsung di sektor pertanian, dan peningkatan akses pasar, 3) Pengembangan kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan posisi kelautan dan perikanan; penguatan daya saing kelautan dan perikanan; penguatan pasar dalam negeri; dan penguatan dan peningkatan pasar ekspor, 4) Pengembangan energi, yang fokus pada pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik.

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index 2013–2014, World Economic Forum 2013 kondisi Indonesia untuk melaksanakan investasi dinilai belum cukup kompetitif sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

The Global Competitiveness Index 2013–2014

No	Negara	Rank	Score
1	Singapore	2	5.61
2	Malaysia	24	5.03
3	Brunei	26	4.95
4	Thailand	37	4.54
5	Indonesia	38	4.53
6	Laos	48	4.08
7	Phillipines	59	4.29
8	Vietnam	70	4.18
9	Kamboja	88	4.01
10	Timor leste	138	3.25
11	Myanmar	139	3.23

Sumber: world Economic Forum 2013//www. Weforum.org

Dikawasan ASEAN, dari 11 negara posisi Indonesia berada di peringkat ke-5 atau 38 peringkat global. Posisi ini menempatkan peringkat Indonesia di bawah Singapura (1), Malaysia (24), Brunei (26), dan Thailand (27), sehingga untuk hadirnya investasi Indonesia masih kalah bersaing dengan keempat negara tersebut. Meningkatnya daya saing Indonesia tercermin dari laporan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) yang merilis Indeks Daya Saing Global 2014-2015. Dalam rilis itu dikemukakan, daya saing Indonesia naik 4 tingkat menjadi peringkat 34 dari 144 negara di dunia. Peningkatan daya saing Indonesia juga banyak didorong oleh kemajuan pembangunan infrastruktur. Meskipun infrastruktur kita masih banyak masalah, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir progresnya cepat, terutama infrastruktur konektivitas.

Untuk meningkatkan daya saing dari negara-negara tetangga, diperlukan tindakan proaktif dari masyarakat juga pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta profesionalisme masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang berdaya



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

saing tinggi, misalnya melalui berbagai pelatihan, seperti kursus bahasa asing atau ketrampilan lainnya yang berkaitan dengan profesi masing-masing individu agar tidak menjadi buruh di negeri sendiri. Masyarakat Indonesia dibutuhkan adanya optimisme dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga bisa menjadi negara yang produktif di ASEAN dan bukan lagi menjadi negara konsumtif yang hanya menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk mewujudkan atau merealisasikan ASEAN Economy Community 2015, sangat diharapkan terciptanya stabilitas ekonomi Indonesia yang lebih kondusif dengan opportunity, dimana Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat diperhitungkan dikalangan negara-negara ASEAN dengan modal sumber daya alam yang begitu besar yang ditunjang pula dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan sumber daya manusia negara-negara ASEAN lainnya. Melalui MEA, kawasan ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya, diharapkan akan semakin mengukuhkan diri sebagai *rising star* alternatif tujuan investasi dan perdagangan dunia selain Tiongkok dan India. Buah MEA tersebut harus dikelola agar bisa dinikmati secara berkelanjutan oleh masyarakat Indonesia. Resepnya, tak ada yang lain, kecuali meningkatkan daya saing melalui SDM yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah dirintis sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan UKM yang sekarang berubah menjadi UMKM. Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UMKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UMKM akan terfokus pada sektor manufaktur. Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UMKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.

UMKM merupakan sektor ekonomi nasional yang telah memiliki payung hukum yang jelas yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai dasar pijakan bagi para pengusaha disektor usaha mikro, kecil dan menengah mengembangkan usahanya. UMKM memiliki nilai yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan dalam hal kualitas maupun kuantitas yang bukan hanya untuk pasar lokal dan nasional, tetapi juga ekspor. Semakin banyak UMKM yang bisa mengekspor, akan semakin besar pula daya saing ekonomi Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan UMKM sangat dibutuhkan adanya; 1). Kualitas infrastruktur keseluruhan (quality of overall infrastructure). 2). Intensitas kompetisi lokal (intensity of local competition). 3). Kapasitas menghasilkan inovasi (capacity of innovation). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur secara keseluruhan dapat peningkatan persaingan dan kemampuan menghasilkan inovasi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas UMKM. Namun peningkatan dukungan perbankan (lembaga kredit)



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

masih memberikan kontribusi negatif dalam kelompok UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap lembaga keuangan bank masih terbatas.

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemberdayaan UMKM dapat berlangsung dengan baik jika diberi dijamin kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM untuk ikut dalam pencatatan ekonomi dengan dukungan yang diperlukan, terutama dukungan bantuan peningkatan kemampuan untuk memperoleh akses pasar, teknologi dan permodalan yang dikembangkan melalui bank maupun non perbankan.
2. Negara-negara yang tergabung dalam komunitas MEA pada prinsipnya akan menghadirkan pelaku-pelaku ekonomi yang mengedepankan prinsip keunggulan yang dengan memperhatikan kehidupan sosial bangsa lain. Sehingga dalam pencapaian setiap tujuan masing-masing bangsa tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang terdapat dalam masing-masing anggota MEA. Infrastruktur merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi.
3. Ketersediaan infrastruktur tentunya dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan MEA 2015 adalah sumber daya manusia yang berlatar belakang seorang *entrepreneur* sejati yang tidak perlu dengan pendidikan tinggi, melainkan dibutuhkan sosok yang memiliki karakter dan petarung sebagai orang yang berjiwa *entrepreneur*.
5. Peran UMKM yang sangat besar sebagai penggerak perekonomian bangsa dengan melihat tingkat konsumtif masyarakat. Kehadiran AEC 2015 memberikan banyak peluang dan manfaat bagi pelaku UMKM (land of opportunities) dalam rangka pengembangan perekonomian Indonesia yang lebih maju. *Three Generic Competitive Strategy* menjadi langkah pilihan UMKM untuk mampu bersaing dengan 10 negara ASEAN atau perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti China dan India, sehingga UMKM menjadi aktor bukan menjadi penonton di negeri sendiri.

SARAN

Indonesia dalam memasuki AEC 2015, diperlukan komitmen yang serius guna memperbaiki berbagai aspek yang menjadi program AEC 2015 antara lain; kebijakan yang belum berpihak pada sektor ekonomi, tingkat daya saing yang rendah, masih minimnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, seperti permodalan dan pemasaran.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Sholiya H, 2015. *Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai Tantangan Indonesia Menghadapi MEA*. From future thinkers in Department of International Relations, Diponegoro University, Indonesia – to the future of ASEAN Economic Community 2015.
- Balassa, Bela. 1962. *The Theory of Economic Integration*. UK: George Allen & Unwin.
- Faulkner, D dan Bowman, C 1997 *Strategi Kompetitif*. Penerbit Anai Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003.
- K. Dianta A. Sebayang, 2011: *Dampak Integrasi Ekonomi ASEAN Terhadap Perdagangan Indonesia Pada Sektor Kendaraan Roda Empat*. Jurnal EconoSain Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011
- P. Anthonius Sitepu, 2003, *Konsep Integrasi Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Schwab, Klaus., Xavier Sala-i-Martin, and Børge Brende. 2013. *The Global Competitiveness Report 2013 -2014*. Geneva: World Economic Forum.
- The Global Competitiveness Index 2013–2014, *World Economic Forum 2013* Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014
<http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014>. The Global Competitiveness Report 2013–2014//World Economic Forum 2013.
<http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014>.The International Institute for Management Development (IMD) Competitive Center.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan UMKM.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2014.
Inpres No. 6 Tahun 2014 dan Strategi Peningkatan Daya Saing world Economic Forum 2013//www. Weforum.org.